

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

13

Mohammad Mulyadi

Abstrak

Kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat berkaitan erat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan adalah suatu ketidakseimbangan kondisi sosio-ekonomi yang ada dalam masyarakat dan mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan ini menggambarkan tentang kemiskinan dan kesenjangan yang masih terus terjadi di Indonesia serta strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah melakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. Melalui fungsi yang dimilikinya, DPR-RI memegang peran penting dalam pengalokasian anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus-menerus dan dicarikan solusinya. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi juga karena gejala kemiskinan sulit untuk ditanggulangi. Salah satu potret kemiskinan tercermin dari peristiwa kematian dua orang anak asal Pademangan, Jakarta Utara ketika

ikut mengantri untuk memperoleh bantuan sembako di Monas belum lama ini. Wakapolri menyatakan akan terus mengusut kasus tersebut (*Kompas*, 9 Mei 2018: 21).

Pada bulan September 2017, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta



orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Ada pun persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,72 persen pada Maret 2017 turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Secara umum kesenjangan yang terjadi di Indonesia meliputi dua aspek, yaitu kesenjangan antarpopulasi dan kesenjangan pendapatan antardaerah. Laporan Bank Dunia berjudul "*Indonesia's Rising Divide*" yang dirilis pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan kesenjangan sosial ekonomi secara signifikan. Tercatat hanya 20 persen penduduk Indonesia yang mampu menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir.

Laporan itu juga mengungkapkan, Indonesia menghadapi masalah konsentrasi kesejahteraan tertinggi di dunia. Tercatat hanya 10 persen masyarakat Indonesia terkaya menguasai sekitar 77 persen kekayaan negara. Artinya, Indonesia diprediksi akan menghadapi permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang makin parah pada masa mendatang. Adapun penyebab peningkatan kesenjangan itu adalah ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan dalam pekerjaan, terkonsentrasinya aset pada kelompok kaya, dan rendahnya resiliensi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Pemerintah sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan

Berkualitas". Pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, rasio gini 0,38-0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,89 persen (*Republika online*, 27 April 2018). Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, tulisan ini ingin memberi gambaran tentang kemiskinan dan kesenjangan yang masih terus terjadi serta bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangannya.

Persoalan Kemiskinan dan Kesenjangan

Para ahli memberikan definisi yang sangat beragam terhadap kemiskinan. Para ekonom sering mendefinisikan kemiskinan semata sebagai fenomena ekonomi, terkait dengan rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian. Namun demikian kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya (Soetrisno, 2001: 78).

BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Rilis data BPS per September 2017 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin (*year-on-year*). Secara absolut jumlah penduduk miskin dari September 2016 ke September 2017 turun 1,18 juta jiwa. Data mengenai perkembangan tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.

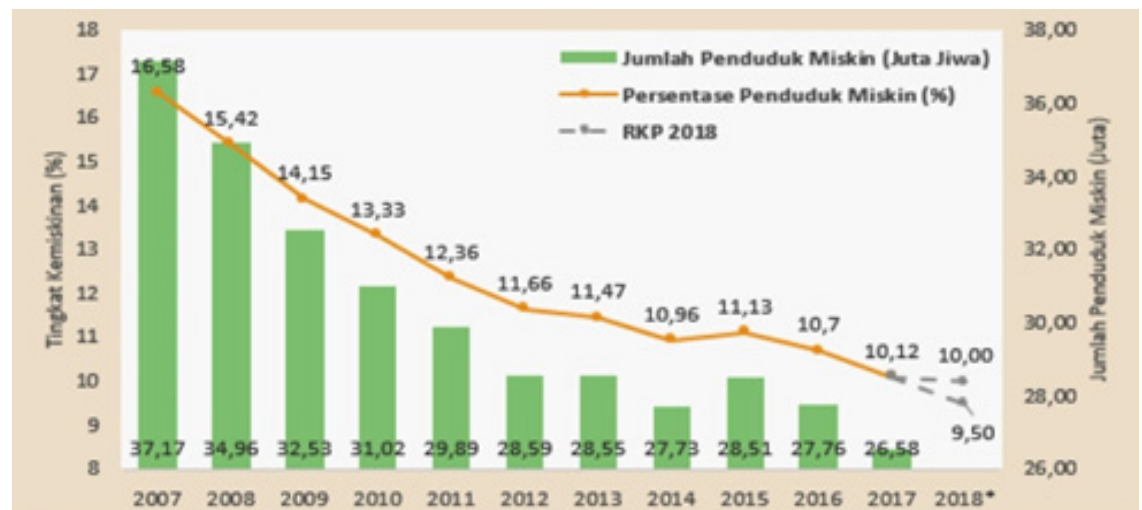
Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Apabila kita lihat perkembangan penurunan kemiskinan sepuluh tahun terakhir, secara rata-rata hanya turun 500 ribu orang per tahun. Dibandingkan tahun 2016, terjadi penurunan kemiskinan di luar kebiasaan pada tahun 2017, yaitu dua kali lipat lebih atau sebesar 1,18 juta jiwa.

Di samping berbagai upaya penanganan kemiskinan, diperlukan pula upaya terobosan untuk mengatasi

persoalan kesenjangan sosial ekonomi. Adapun penyebab terjadinya adalah adanya kesempatan yang belum merata, akses terhadap lapangan pekerjaan yang belum merata, kepemilikan aset masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang kaya, dan masih rendahnya resiliensi.

Selama ini, masih terjadi disparitas pembangunan di bidang infrastruktur, baik jalan, irigasi, maupun kelistrikan yang masih berkatat di wilayah Jawa sebesar 58,4 persen dan Sumatera 22 persen. Konsentrasi ekonomi di Jawa dan Sumatera ini merupakan akibat dari konsentrasi wilayah industri (*Republika online*, 20 Oktober 2017). Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi pada wilayah terpencil yang jauh dari pusat-pusat ekonomi di Jawa dan Sumatera. Dengan struktur wilayah kepulauan, biaya logistik yang rendah menjadi faktor penentu diversifikasi dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi.

Contoh konkrit kondisi kesenjangan sosial dalam kehidupan nyata di Indonesia dapat dilihat di Jakarta sebagai ibukota negara. Sebagai kota metropolitan dengan



Sumber: BPS, Tahun 2011-2017 Angka September.

Grafik 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2009-2017

Tabel 1. Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	16,6	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,5	11,0	11,1	10,9 ¹
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 ¹
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0,35	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40

*Maret 2016

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

banyak gedung tinggi, rumah mewah, teknologi yang sangat maju, ternyata masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Kondisi seperti ini juga banyak terjadi di wilayah lain dan hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang nyata.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan nasional terjadi secara perlahan dan konsisten. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulan (per kapita) sebanyak Rp354,386 (atau sekitar USD \$25). Dengan demikian, patokan standar hidup di Indonesia ditentukan sangat rendah.

Apabila kita menggunakan nilai garis kemiskinan dari Bank Dunia yang mengklasifikasikan kemiskinan dengan standar penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari, maka persentase tabel di atas menjadi tidak akurat. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang

dari USD \$2 per hari angkanya akan meningkat lebih tajam lagi.

Strategi Pemerintah

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa di antaranya yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan lima prioritas nasional dan 24 program prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek (satuan tiga) di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Lima prioritas nasional tersebut terdiri atas: 1) pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; 4) pemantapan ketahanan energi, pangan, dan

sumber daya air; dan 5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu (*Republika online*, 27 April 2018).

Program lainnya adalah perluasan bantuan sosial nontunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan nontunai untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, dan program padat karya tunai (*cash for work*) untuk masyarakat kurang mampu. Padat karya tunai bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka *stunting*, dan mengurangi kemiskinan. desa yang mengalami bencana, pasca-konflik, dan rawan pangan.

Hasil riset yang dipaparkan dalam Konferensi “*Evidence on Stunting from Three Randomized Evaluation in Indonesia*” pada 8 Mei 2018 lalu menyatakan bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai dapat menurunkan *stunting* secara signifikan (*Kompas*, 9 Mei 2018: 14). Hal ini dikarenakan setelah enam tahun PKH digulirkan, terjadi perubahan perilaku kesehatan penerima bantuan, sehingga diharapkan dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan edukasi secara maksimal oleh fasilitator kepada penerima bantuan. Selain itu, penyediaan fasilitas kesehatan di daerah juga masih perlu ditingkatkan.

Penutup

Berdasarkan data dari *Worldfactbook*, BPS, dan *World Bank*, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Di beberapa negera berkembang, termasuk

Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya, sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi harus dapat diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan, agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial antara lain dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. Harapannya, angka kemiskinan dapat ditekan dan angka kesenjangan akan menurun. Semakin rendah jumlah kemiskinan, maka akan semakin rendah pula tingkat kesenjangan. Terkait persoalan kemiskinan dan kesenjangan, DPR-RI memegang peran penting dalam pengalokasian anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Referensi

- Mulyadi, Mohammad. (2014). *Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Publica Press.
- Nugroho, Heru. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, Loekman. (2001). *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sriharini. (2007). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.

“Kemiskinan dan Ketimpangan”, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses 7 Mei 2018.

“Kesenjangan Sosial Ekonomi Berpotensi Makin Parah”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/16/ekonomi/makro/17/10/20/oy3lfh440-kesenjangan-sosial-ekonomi-berpotensi-makin-parah>, diakses 7 Mei 2018.

“Meluasnya Ketimpangan di Indonesia”, <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>, diakses 2 Mei 2018.

“Program Keluarga Harapan Berdampak Positif”, *Kompas*, 9 Mei 2018, hal. 14.

“Siaran Pers-Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS”, https://www.bappenas.go.id/files/8915/1554/7073/Siaran_Pers_-_Membedah_Angka_Kemiskinan_dan_Kesenjangan_Rilis_Data_Terkini_BPS.pdf, diakses 2 Mei 2018.

“Tingkat Kemiskinan 2019 Ditargetkan 85 Persen”, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/04/27/p7unyu416-tingkat-kemiskinan-2019-ditargetkan-85-persen>, diakses 9 Mei 2018.

“Wakapolri: Kasus Sembako di Monas Lanjut”, *Kompas*, 9 Mei 2018, hal. 21.



Mohammad Mulyadi
mahammad.mulyadi@dpr.go.id

Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tahun 2008. Saat ini, ia menjadi Peneliti Bidang Kepakaran Sosiologi Politik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisannya dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 3) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 4) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial; 5) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 6) Desa, Dinamika Sosial Kehidupan di Desa.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.